



Sayap Organisasi Partai Dan Upaya Pemenuhan Calon Legislatif

Perempuan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Party Organizational Sides and Efforts to Fulfill Female Legislative Candidates in the 2024 General Election

Andi Masnira, Sukri, Ariana

FISIP Universitas Hasanuddin Makassar

andimasnirasis85@gmail.com

Abstrak

Mempersiapkan kandidat calon legislatif perempuan sejak awal sangat penting agar partai politik tidak hanya memenuhi aturan 30 % keterwakilan perempuan sebagai syarat administrasi melainkan memiliki calon legislatif perempuan potensial yang memiliki daya saing dalam kontestasi pemilu nantinya, yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya Partai Amanat nasional (PAN) Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan sayap oraganisasi partai perempuannya yaitu Perempuan Amanat Nasional (PUAN) dalam pemenuhan kandidat calon legislatif perempuannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Partai Amanat Nasional optimis dengan mengaktifkan oraganisasi sayap perempuannya partai tidak akan lagi mengalami kesulitan dalam pemenuhan kuota 30 % perempuan dalam daftar calon bahkan optimis mengirim paling sedikit 2 orang perempuan sebagai perwakilan di DPRD Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat pada pemilihan umum tahun 2024.

Kata Kunci: Sayap Organisasi Partai; Calon Legislatif Perempuan; Pemilu

Abstract

Preparing female legislative candidates from the start is very important so that political parties not only meet the 30% rule of women's representation as an administrative requirement but have potential female legislative candidates who have competitiveness in the election contestation later, the focus of this research is how the efforts of the National Mandate Party (PAN) of Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province with its women's party wing, namely the National Mandate Women (PUAN) in fulfilling their female legislative candidates. The method used in this research uses a qualitative approach. The National Mandate Party The National Mandate Party is optimistic that by activating its women's wing organization, the party will no longer experience difficulties in fulfilling the 30% quota for women in the candidate list and is even optimistic about sending at least 2 women as representatives in the legislature of Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province in the 2024 general election.

Pendahuluan

Pemilu menjadi ajang kontestasi Partai Politik dalam mencapai tujuan sebagai pemenang di parlemen. menjelang Pemilu Partai Politik mulai mempersiapkan diri untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam masyarakat, salah satu hal yang menarik perhatian publik adalah kandidat-kandidat yang dipilih oleh partai sebagai calon legislatif yang akan bersaing untuk mendapat suara dari masyarakat. Pada pemilihan legislatif Partai Politik diharuskan untuk memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan yang termuat dalam daftar calon oleh karena itu perlu mempersiapkan kandidat calon legislatif perempuan sejak awal, hal tersebut agar Partai Politik tidak hanya memenuhi aturan 30 % keterwakilan perempuan sebagai syarat administrasi semata melainkan mempersiapkan calon legislatif perempuan potensial yang memiliki kualitas serta daya saing dalam kontestasi Pemilu nantinya. Untuk itu Partai Politik kemudian merekrut calon-calon kandidat perempuan dengan beberapa cara (Andani, Taqwa, & Suleman, 2019).

Pemilihan kandidat calon legislatif perempuan di hampir semua negara memiliki masalah yang bervariasi. Masalah tersebut antara lain kondisi sifat rezim politik dan tingkat pembangunan demokratis di negara tersebut, tingkat keaktifan organisasi perempuan, kader-kader yang dimiliki partai yang siap menjadi kandidat perempuan, kekuatan Partai Politik dan sistem pemilihan yang digunakan (Ballington & Matland, n.d.). Kewajiban Partai Politik untuk mengikutsertakan keterwakilan perempuan 30% dalam daftar calon tetap masih terkendala dengan beberapa hal antara lain adanya kultur patriarki yang menjemuk di Indonesia membuat peran perempuan terbatas pada lingkup pribadi sehingga aktivitas perempuan dalam kehidupan politik masih terbatas (Budiardjo, 2003).

Pola rekrutmen calon legislatif perempuan belum didasarkan pada kualitas melainkan kedekatan dengan pimpinan partai atau pada modal yang dimiliki, Perempuan tidak memiliki biaya politik dan pemahaman ajaran agama yang bias gender juga turut membatasi ruang gerak perempuan, karena Partai Politik masih didominasi oleh laki-laki, maka keterwakilan 30 % masih menjadi sekedar syarat administrasi bukan untuk menjadikan perempuan calon terpilih (Hendrawati, 2014a).

Menurut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ada tiga hal penyebab tidak tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, yaitu Partai Politik belum sepenuhnya memberikan kesempatan dan peluang yang luas kepada kaum perempuan, . Kaum perempuan sendiri belum siap berkompetisi secara terbuka dalam dunia politik, Kultur masyarakat belum

sepenuhnya berpihak pada peningkatan peningkatan peran kaum perempuan (Silalahi, Marpaung, Panjaitan, & Da'o, 2020). Menurut Khofifah Indar Prawansa dalam publikasi Internasional IDEA (2002) mengemukakan bahwa penyebab masih kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka diantaranya sistem patriarkial yang masih kental dianut dalam masyarakat. Sistem ini kemudian membentuk persepsi yang cenderung bias tentang bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan dipandang cukup mengurus domestik dan ruang-ruang pribadi saja (Fure, Pati, & Posumah, 2020).

Adanya aturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % dalam daftar calon mengharuskan Partai Politik memenuhi kuota yang telah ditetapkan tersebut, hanya saja fakta yang terjadi bahwa beberapa partai, khususnya di tingkat Kabupaten masih kesulitan untuk memperoleh kandidat perempuan apalagi kandidat perempuan potensial yang memiliki rekam jejak politik, kualitas dan daya saing. Kabupaten Pasangkayu yang sebelumnya bernama Kabupaten Mamuju Utara merupakan salah satu kabupaten baru hasil dari pemekaran dari Kabupaten Induk Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, sebagai kabupaten baru kemajuan politik khususnya perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut terbukti dengan terpilihnya ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pasangkayu adalah seorang perempuan, begitupun salah satu partai yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang ketua partainya juga adalah seorang perempuan. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana keberadaan sayap organisasi perempuan ketika Partai Politik dipimpin oleh seorang perempuan, apakah sayap organisasi perempuan memiliki peranan khususnya dalam upaya pemenuhan kandidat calon legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses dan prosedur untuk mengkaji lebih dalam lagi keberadaan sayap organisasi partai perempuan khususnya pada Partai Amanat Nasional (PAN) dengan sayap organisasi Perempuan Amanat Nasional (PUAN). Melakukan wawancara langsung dengan Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Pasangkayu dengan berfokus pada karakteristik, tindakan, kendala-kendala dan lainnya secara menyeluruh. Mengutamakan pengalaman subjektif Partai Amanat Nasional (PAN) dalam mempersiapkan dan memenuhi kandidat calon legislatif perempuan pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang dan program-program kerja yang pro perempuan dengan Ketua partai

adalah seorang perempuan sekaligus anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Pasangkayu.

Hasil dan Pembahasan

Di Indonesia, organisasi sayap politik lebih banyak terdiri dari elemen-elemen keterwakilan kalangan-kalangan tertentu, misalnya kalangan muda dan perempuan. Keberadaan organisasi sayap Partai Politik adalah melekat pada Partai Politik, Organisasi sayap partai merupakan bagian dari Partai Politik dalam rangka menjalankan fungsi dan tujuan Partai Politik. Sehingga secara khas, organisasi Partai Politik mempunyai aktifitas-aktifitas politik sebagaimana Partai Politik yang menaunginya. Pengaturan tersebut diantaranya meliputi bentuk hukum organisasi sayap partai, pengaturan internal (manajemen dan aktivitasnya) secara institusional, batasan-batasan dan *framework*. Aturan lebih detail dan spesifik berkenaan dengan organisasi sayap partai menjadi ranah internal partai karena pengaturan pendirian dan kegiatannya ada dalam AD/ART dan peraturan organisasi partai. Sehingga pengaturan teknis organisasi sayap partai tergantung pada internal Partai Politik. Beberapa Partai Politik belum mengatur organisasi sayap partai dalam AD/ART maupun peraturan partainya (Budiardjo, 2003).

Sebagai *intermediary agent* yang menghubungkan antara negara dengan warga negara, Partai Politik memiliki karakter ideologi, program, pengorganisasian Partai Politik yang berbeda satu sama lain termasuk soal keterwakilan perempuan. Hampir semua Partai Politik di Indonesia memiliki pengorganisasian khusus perempuan tersendiri dalam struktur kepartaian ataupun dalam bentuk sayap partai. Pasca diterapkannya kebijakan afirmatif untuk mendorong keterwakilan perempuan, penguatan partisipasi politik perempuan di internal partai juga dapat dilihat dari pertama, keberadaan divisi perempuan di dalam struktur partai sebagai upaya untuk menjamin kehadiran perempuan dalam proses pembuatan keputusan, dan kedua, keberadaan organisasi sayap perempuan yang bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat keterwakilan perempuan baik dalam proses politik di partai maupun di dalam Pemilu (Tania Aryadna Prasetya, 2019).

Demokrasi internal partai yang sudah disusun sedemikian rupa belum dijalankan sesuai dengan sebagaimana mestinya, terkadang partai mengusung calon yang bukan dari partainya, adapun nama perempuan dalam daftar hanyalah sebuah nama yang berharga untuk memenuhi dari segala peraturan, peraturan dari partai sendiri maupun dari undang-undang yang berlaku dan partai akan lebih mengusung calon yang dianggap mempunyai suara tinggi di masyarakat dari hasil survey (Iqbal & Kurniawan, 2020)

Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pasangkayu dengan ketua partai seorang perempuan memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan sayap Partai Politik perempuan yang dimiliki PAN yaitu Perempuan Amanat Nasional (PUAN). Keberadaan sayap organisasi perempuan yang selama ini berada dalam tidur panjang, ditangan seorang ketua partai perempuan dikelola dan diaktifkan sehingga terlihat lebih eksis dalam menjalankan program-program partai yang terkait dengan pemberdayaan perempuan.

Keberadaan PUAN memperlihatkan warna tersendiri pada Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pasangkayu dimana PUAN sudah mulai di hadirkan dari akar rumput dengan mengaktifkan pengurus mulai dari tingkat desa/kelurahan, hal tersebut diharapkan agar pemberdayaan perempuan dan pendidikan politik perempuan dapat diterapkan dalam masyarakat yang masih minim. Kehadiran Perempuan Amanat Nasional (PUAN) secara umum banyak difungsikan pada pemberdayaan masyarakat dan secara khusus pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan isu gender dan pengawasan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, koordinasi kegiatan anggota perempuan di dalam partai, serta pelaksanaan fungsi mobilisasi dan sosialisasi. Keberadaan organisasi sayap perempuan tentu seharusnya memiliki nilai tambah (*added value*) tersendiri di dalam mendorong penguatan kader perempuan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Partai Amanat Nasional Muslihat Kamaluddin, bahwa dengan diaktifkannya Perempuan Amanat Nasional (PUAN) maka pendidikan politik bagi perempuan akan lebih diperluas lagi sampai pelosok-pelosok, kader-kader PUAN juga dihadirkan untuk bisa membangkitkan perekonomian keluarga dengan adanya bantuan usaha dari partai, perlu menggunakan hati untuk mendekati pemilih-pemilih perempuan sehingga dengan adanya PUAN merupakan penghubung yang paling afektif antara Partai dengan masyarakat dan selalu dilibatkan dalam kegiatan politik.

Tidak hanya saat Pemilu, PUAN juga akrab dengan kegiatan masyarakat seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, pendidikan anak usia dini hingga pemberdayaan ekonomi perempuan, kegiatan tersebut memungkinkan kader PUAN bisa lebih cepat mendapat simpati masyarakat. Meski tidak mewajibkan kader PUAN menjadi politisi, tapi semua anggotanya diberikan pendidikan politik di PAN dengan jenjang tingkat dasar, madya, hingga utama. Muslihat menuturkan, peranan perempuan sebenarnya lebih mendominasi kegiatan di akar rumput. Contoh kecilnya adalah lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pasti yang menjadi penggerak utama adalah perempuan. Demikian juga di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Beragam kegiatan Partai Politik pasti lebih banyak melibatkan perempuan.

Mengutip Peta Jalan Representasi Perempuan untuk Pemilu 2019 yang dibuat oleh Puskapol dan MPI (2017), ada tiga hal yang melatarbelakangi mengapa Partai Politik di Indonesia membentuk bidang khusus perempuan dalam struktur kepartaian ataupun organisasi sayap partai perempuan: Pertama, sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan akan representasi politik perempuan. Dalam hal ini, bidang khusus perempuan dalam struktur kepartaian ataupun organisasi sayap partai menjadi lumbung rekrutmen Partai Politik secara khusus bagi perempuan yang akan mencalonkan di eksekutif maupun legislatif yang memiliki ketentuan affirmative action 30% pencalonan perempuan dalam Pemilu legislatif. Kedua, institusionalisasi kepartaian dalam rangka penguatan pengakaran (Andani et al., 2019).

Puskapol UI dan MPI (2017) menjelaskan bahwa ada tiga hal mengapa Partai Politik di Indonesia membentuk bidang khusus perempuan dalam struktur kepartaian ataupun organisasi sayap partai perempuan: Pertama, sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan akan representasi politik perempuan. Dalam struktur kepartaian ataupun organisasi sayap partai menjadi lumbung rekrutmen Partai Politik secara khusus bagi perempuan yang akan mencalonkan di eksekutif maupun legislatif yang memiliki ketentuan affirmative action 30% pencalonan perempuan dalam legislatif. Kedua, institusionalisasi kepartaian dalam rangka penguatan pengakaran partai (*party rooting*) terutama dikalangan penduduk dan pemilih perempuan. Ketiga, dibentuknya bidang khusus perempuan dalam struktur partai menjadi sarana agregasi sekaligus artikulasi kebijakan Partai Politik yang berkaitan dengan isu-isu perempuan.

Kedua, berkaitan dengan fungsi organisasi sayap perempuan di dalam Partai Politik. Organisasi sayap perempuan memiliki fungsi yang cukup krusial sebagai supporting system bagi Partai Politik yakni fungsinya sebagai sumber rekrutmen, kaderisasi, dan *vote getter* khususnya pemilih perempuan (Lastari, Prastyawan, & Isbandono, 2019). Fenomena menjelang Pemilu bahwa Partai Politik hanya mampu memenuhi syarat 30% keterwakilan calon legislatif perempuan tidak diikuti dengan keberhasilan para calon legislatif perempuan untuk berhasil menjadi calon terpilih dan memperoleh kursi dilegislatif. Bahkan beberapa partai masih kesulitan memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon, disebabkan karena tidak difungsikannya secara serius organisasi sayap perempuan dengan baik oleh Partai Politik sebagai sumber rekrutmen dan kaderisasi. Disamping itu kaderisasi hanya menjadi salah satu strategi alternatif dalam meningkatkan kuota keterwakilan perempuan, sehingga calon legislatif perempuan dihadirkan dalam kontestasi hanya sebagai pemenuhan aturan

keterwakilan perempuan dan untuk menjadi kader perempuan yang potensial dan menjadi anggota legislatif perempuan terpilih bukan menjadi tujuan utama (Hendrawati, 2014b).

Berangkat dari pengalaman pada pemilihan umum tahun 2019 dimana Partai Amanat Nasional Kabupaten Pasangkayu tidak mampu memenuhi semua alokasi calon dalam daftar calon tetap karena kesulitan dalam merekrut kandidat calon legislatif khususnya perempuan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024, salah satu langkah strategi partai Amanat Nasional yang saat ini ketuanya adalah seorang perempuan yaitu dengan mengaktifkan sayap organisasi partai perempuan, Perempuan Amanat Nasional (PUAN) sebagai Organisasi Otonom PAN memiliki menjadi tugas merekrut perempuan menjadi kader partai dan menjadi sumber kandidat calon perempuan untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon pada pemilihan umum tahun 2024. Saat ini pengurus DPP PAN berisi lebih dari 30% perempuan. Artinya, PAN memang memberi ruang besar untuk keterwakilan perempuan di dalam politik.

Muslihat menuturkan dalam persiapan menghadapi Pemilihan Umum 2024, dengan adanya kader PUAN, partai tidak akan kesulitan lagi untuk memenuhi 30% daftar calon perempuan bahkan target yang ingin dicapai bukan hanya memenuhi aturan 30% akan tetapi paling sedikit ada 2 (dua) orang calon legislatif perempuan yang akan duduk di kursi DPRD Kabupaten Pasangkayu oleh karena partai mulai mempersiapkan kandidat-kandidat potensial yang akan menjadi calon-calon legislatif perempuan bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat administrasi. Adanya program sekolah politik dari DPP PAN dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan lebih banyak mengirim kader-kader perempuan untuk dibekali pendidikan politik.

Perempuan di ranah politik khususnya yang aktif dalam suatu Partai Politik selalu mendapatkan tantangan-tantangan, kendala-kendala dari berbagai pihak, baik dari partainya sendiri, masyarakat umum bahkan dari lingkungan keluarga. Adanya fakta bahwa kader perempuan terkadang tidak menjadi skala prioritas dan dikesampingkan dalam pengurusan partai yang strategis menjadikan kader-kader perempuan tidak memiliki kepercayaan diri dalam berpolitik dan hanya berada di belakang layar, jikapun mereka hadir dalam daftar calon pada pemilihan legislatif, kader-kader perempuan ini hanya menjadi pemenuhan syarat administrasi. Organisasi sayap perempuan partai ternyata lebih banyak difungsikan sebagai *vote getter*, mendekatkan partai terhadap pemilih khususnya kelompok perempuan sebagai salah satu basis strategis. Padahal dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber rekrutmen, seharusnya organisasi sayap perempuan terhubung (*connected*) dengan lembaga atau badan

pemenangan Pemilu (BAPPILU) di masing-masing partai yang memiliki kewenangan strategis di dalam menentukan rekrutmen caleg, penempatan nomor urut, dan penempatan daerah pemilihan (dapil). Begitupula dalam hal fungsi kaderisasi, organisasi sayap perempuan seharusnya terhubung (*connected*) dengan struktur partai agar dapat mendorong agenda keterwakilan perempuan dalam partai dan kebijakan pro gender (Hurriyah & Wildianti, 2020).

Dalam internal Partai Amanat Nasional (PAN) khususnya dalam oranganisasi Perempuan Amanat Nasional adanya hambatan-hambatan dalam partai betul-betul diminimalisir, perempuan diberi kesempatan yang selebar-lebarnya untuk dapat menggali potensi diri, diberikan pendidikan politik dan menjadi skala prioritas dalam peningkatan kader-kader potensial, yang menjadi kendala menurut Muslihat Kamaluddin adalah terkadang terjadi konflik dalam oranganisasi PUAN ini sendiri yang terkadang dipicu oleh pihak-pihak dari luar, misalnya dalam pemilihan pengurus inti PUAN ditingkat desa, dalam memilih pengurus inti, partai akan melihat bagaimana sosok dan karakter kader yang bersangkutan dan beberapa kriteria yang ditentukan secara internal, dan ada sebagian kader yang tidak menerima keputusan partai dengan melakukan protes dan menanyakan langsung kepada ketua partai, oleh karena itu untuk menyelesaikan konflik seperti ini, ketua PAN memberi penjelasan dengan baik dan bisa diterima. Kendala lain bisa dari sisi pribadi kader ini sendiri, adanya tidak percaya diri bagi kader-kader untuk maju dan bersaing dalam Pemilu, sehingga partai lebih giat memberi pendidikan politik dan faktor lainnya yaitu lingkungan keluarga yang kadang tidak mendukung kiprah perempuan dalam dunia politik sehingga perlu pendekatan persuasif kepada pihak keluarga kader PUAN dan memperlihatkan kerja nyata kader PUAN dalam masyarakat (Fure et al., 2020).

Kesimpulan dan Saran

Fakta bahwa hanya sedikit perempuan yang duduk di jabatan pembuatan keputusan dalam Partai Politik, perempuan lebih mendominasi jabatan ataupun kegiatan pendukung partai di tingkat akar rumput sehingga perempuan sebagai kelompok yang termarginalisasi tidak cukup memiliki peran atau posisi yang strategis di dalam partai. Begitu pula temuan riset ini melihat bahwa Partai Politik belum secara serius melakukan rekrutmen serta kaderisasi politik terhadap perempuan dan sekedar memenuhi kuota 30% pencalonan perempuan sebagai syarat administrasi sebagai peserta Pemilu.

Partai Amanat Nasional lewat Perempuan Amanat Nasional (PUAN) sebagai sayap oranganisasi partai perempuan mulai aktif merekrut, menata kepengurusan, memberikan

pendidikan politik dan mulai bekerja dimasyarakat, memperlihatkan kerja-kerja nyata PUAN dalam pemberdayaan perempuan. Perempuan Amanat Nasional (PUAN) selain sebagai sebagai *vote getter*, mendekatkan partai terhadap pemilih khususnya kelompok perempuan sebagai salah satu basis strategis juga diharapkan sebagai sumber kandidat calon legislatif perempuan yang potensial dan siap bersaing pada pemilihan umum, dimana kandidat calon legislatif perempuan dihadirkan bukan hanya sebagai syarat pemenuhan paling sedikit 30 % dalam daftar calon melainkan menjadikan calon legislatif terpilih dan menjadi perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pasangkayu.

Langkah strategis Partai Amanat Nasional di tingkat Kabupaten Pasangkayu dengan mengaktifkan Sayap organisasi Partai Perempuan yaitu PUAN merupakan persiapan awal yang bisa menjadi pelajaran bagi partai lain, dimana fenomena yang terjadi bahwa dalam pemenuhan 30 % kandidat perempuan Partai Politik selalu kesulitan, dengan mengaktifkan sayap organisasi partai yang ada bukan hanya lebih mudah memenuhi kuota yang diwajibkan akan tetapi yang lebih penting lagi bahwa fungsi pengkaderan Partai Politik dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, M., Taqwa, R., & Suleman, Z. (2019). Rekrutmen Dan Kaderisasi Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Oleh Partai Keadilan Sejahtera. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(3), 427–444. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i3.2019.427-444>
- Ballington, P. J., & Matland, R. E. (n.d.). *Political Parties and Special Measures: Enhancing Women's Participation in Electoral Processes*.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fure, C., Pati, A. B., & Posumah, D. (2020). STRATEGI PDI-PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 9(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30459>
- Hendrawati. (2014a). Rekrutmen Perempuan Menjadi Politisi Legislatif. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 18(2). <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v18i2.15>
- Hendrawati. (2014b). Rekrutmen Perempuan Menjadi Politisi Legislatif. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 18(2). <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v18i2.15>
- Hurriyah, H., & Wildianti, D. (2020, May 18). *Partisipasi tanpa Representasi: Analisis Relasi Organisasi Sayap Perempuan dengan Partai Politik di Indonesia*.
- Iqbal, M. M., & Kurniawan, A. S. (2020). Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1030>
- Lastari, Y., Prastyawan, A., & Isbandono, P. (2019). FORMULASI STRATEGI PARTISIPASI PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 | Journal of Gender and Children Studies. *Journal of Gender and Children Studies*, 1(1). Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6816>
- Silalahi, M., Marpaung, P., Panjaitan, D. T. M. R., & Da'o, B. (2020). POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PARTAI POLITIK PERINDO PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI SUMATERA UTARA. *JURNAL GOVERNANCE OPINION*, 4(2), 130–149.
- TANIA ARYADNA PRASETYA, 071511333084. (2019). *POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2019 (Studi Kasus Partai Golkar Surabaya)* (Skripsi, Universitas Airlangga). Universitas Airlangga. Retrieved from <Http://lib.Unair.ac.id>